



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Agustus 2016

Dari Redaksi

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
MERDEKA...MERDEKA..**



MERDEKA!!!

Pada edisi kedelapan Horas Medan kali ini, Redaksi diantaranya menampilkan berita terkait dengan Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 Tahun 2016, dan Focus Group Discussion dengan Ditama Binbangkum BPK RI terkait perkara-perkara di Pengadilan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Dua Puluh Sembilan LHP atas LKPD Telah Diserahkan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015 kepada dua puluh delapan Pemerintah Daerah dan satu Pemerintah Provinsi, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara pada 24 Mei 2016, Pemkab Tapsel pada 24 Mei 2016, Pemko Binjai (25 Mei 2016), Pemko Pematangsiantar (25 Mei 2016), Pemkab Langkat (25 Mei Juni 2016), Pemkab Deli Serdang (1 Juni 2016), Pemko Padangsidimpuan (1 Juni 2016), Pemkab Karo (6 Juni 2016), Pemkab Pakpak Barat (6 Juni 2016), Pemkab Samosir (6 Juni 2016), Pemkab Batubara (6 Juni 2016), Pemkab Serdang Bedagai (6 Juni 2016), Pemkab Asahan (6 Juni 2016), Pemkab Tapanuli Tengah (6 Juni 2016), dan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diserahkan ke DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juni 2016, Pemko Tebing Tinggi (21 Juni 2016), Pemkab Labuhanbatu Utara (30 Juni 2016), Pemkab Labuhanbatu Selatan (11 Juli 2016), Pemkab Padang Lawas Utara (11 Juli 2016), Pemkab Simalungun (21 Juli 2016), Pemkab Padang Lawas (21 Juli 2016), Pemkab Nias (21 Juli 2016), Pemkab Nias Barat (25 Juli 2016), Pemkab Nias Selatan (25 Juli 2015), Pemkab Dairi (27 Juli 2016), Pemkab Toba Samosir (27 Juli 2016), Pemkab Dairi (27 Juli 2016), Pemko Gunungsitoli (1 Agustus 2016), Pemko Medan (4 Agustus 2016), Pemkab Mandailing Natal (15 Agustus 2016).

Enam Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Labuhanbatu Selatan, dan Pemkab Dairi.

Dua Puluh Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Pemkab Karo, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemko Pematangsiantar, Pemkab Batubara, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Asahan, Pemkab Pakpak Barat, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Nias Barat, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Nias, Pemkab Toba Samosir, Pemko Gunungsitoli, Pemko Medan, Pemkab Madina.

Tiga Pemerintah Daerah yang menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / Disclaimer, yaitu Pemkab Deli Serdang, Pemkab Samosir, dan Pemkab Nias Selatan.

Sedangkan Pemerintah Daerah yang belum menerima LHP atas LKPD yaitu, Pemko Tanjungbalai, Pemkab Nias Utara, Pemkab Labuhan Batu, Pemkab Humbang Hasundutan, dan Pemko Sibolga.

Dewan Redaksi

Pengarah : Ambar Wahyuni
 Penanggungjawab : Agung Hartono
 Ketua : Iskandar Setiawan
 Pelaksana:
 Petrus Sihaloho, Venny, M. Amin, Ahmad Nur,
 Wahyu Isdaryanto, Lyz Anita Butar-butur,
 Ratna Tri D, Nursalam Harijanja, Leni
 Dianawati, Desi Sidauruk, Ronal Polatua,
 Awiek Prama Yudha, Dar Agnema, Ali Azril



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 ATAS
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015**

Upacara

HUT RI ke-71 Tahun 2016



Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT ke-71 Republik Indonesia pada Rabu, 17 Agustus 2016 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan. Pada upacara HUT RI ke-71 ini, Kepala Perwakilan, V.M. Ambar Wahyuni, bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagai komandan upacara adalah, Kepala Sekretariat, Agung Hartono.

Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. melalui pidatonya yang dibacakan oleh inspektur upacara, menyampaikan bahwa laporan

hasil pemeriksaan BPK akan terlihat bermanfaat apabila dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemngku kepentingan. Salah satu tolok ukur manfaat ini adalah tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada periode 2010-2014,

rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebesar 64%.

Hal ini harus terus ditingkatkan sehingga manfaat pemeriksaan semakin meningkat,

Pada akhir pidatonya Ketua BPK juga mengingatkan, dengan keterbatasan anggaran

segenap unsur BPK dituntut harus lebih cermat dalam memanfaatkan anggaran untuk

pemeriksaan dan kegiatan yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Serta semakin

kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas program-program BPK.

Pada kesempatan ini juga diadakan pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana

Karya Satya kepada Para Pegawai BPK yang

telah mengabdikan selama 10 hingga 30 tahun di

BPK.

Upacara yang dilaksanakan pada pagi hari

yang cerah tersebut diikuti oleh segenap

pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara, berlangsung dengan tertib dan khidmat.



FGD

Dengan Ditama Binbangkum

Ditama Binbangkum melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Subbag Hukum dan Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis, 4 Agustus 2016 bertempat di ruang rapat lantai IV. Acara dibuka oleh Ibu Jenny M.B. Lubis selaku Kasubbag Hukum. Pemaparan materi FGD dibawakan Ibu Sarmauli Marpaung selaku Kepala Sub Direktorat Pengembangan Hukum Direktorat LPBH. Tujuan FGD antara lain untuk memperoleh informasi terkait dengan perkara-perkara di Pengadilan yang berhubungan dengan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

